

MONEV, PENGAWASAN PPDB 2021 DI PROVINSI JAMBI DIPERKETAT

Selasa, 06 Juli 2021 - Reihana Ferdian

JAMBERITA.COM - Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Provinsi Jambi Tahun 2021.

"Ombusman disini hadir dalam rangka memberikan keterangan terkait permasalahan-permasalahan dengan pengaduan PPDB," ujar Plt Inspektur Provinsi Jambi Ferdiansyah, Selasa (6/7/2021).

Lebih lanjut Kepala Ombusman RI Perwakilan Provinsi Jambi Indra mengatakan bahwa pihaknya kini sudah membuka posko pengaduan terkait dengan PPDB yang sedang berjalan.

"Kita sudah memberikan panduan dan metting dari setiap tahapan itu dimana saja titik titik rawan, yang kemungkinan terjadi. Itu hasil dari pengawasan selama 4 tahun," terangnya.

Untuk itu, Ombudsman meminta kepada pihak Dinas Pendidikan (Disdik) dan Inspektorat agar bisa membuat mitigasi nya seperti apa, sehingga permasalahan-permasalahan dari tahun sebelumnya itu muncul lagi ditahun ini.

"Jadi harapan kami, proses penyelenggaraan tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya," jelasnya.

Sejauh ini Ombusman mengklaim belum adanya pengaduan soal PPDB 2021, tetapi baru hanya sebatas konsultasi saja.

"Jadi modal kita, itu beda-beda, ada yang laporan secara langsung ada juga konsultasi terlebih dahulu," tuturnya.

Selain itu Ombusman juga mengatakan ketika adanya laporan dan konsultasi tentunya mereka turut berperan untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa mengoptimalkan pengaduan yang ada dari internal pemerintah.

"Dalam hal ini bisa inspektorat, atau langsung bisa dari Diknas itu sendiri," ungkapnya.

Kepala BPKP Jambi Sueb Cahyadi menegaskan, mereka hadir dalam rangka memberikan pembekalan kepada rekan-rekan di Provinsi Jambi yang akan melaksanakan tugas pengawasan.

"Kami pernah melakukan Monev di tahun 2019, ada beberapa faktor permasalahan yang tadi kami sampaikan," katanya.

BPKP, lanjut Suwb berharap agar persoalan-persoalan ini bisa dipantau oleh Inspektorat sehingga bisa diselesaikan ataupun diberi solusi dengan baik sehingga kedepan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang muncul di PPDB.

"Memang setiap tahun dikeluarkan peraturan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sifatnya ada memperbaiki proses prosedur dari tahun-tahun lalu, sehingga kedepan semakin baik dan di daerah pun sudah jelas menerima arahan dari Kementerian," ujarnya.

Dengan begitu, jika adanya peluang-peluang penyimpangan itu semakin kecil, apalagi saat ini semua sudah berbasis online sehingga tahapan proses bisa dipantau, diawasi baik oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami memberikan pembekalan, mana-mana, kira-kira kerawanan yang akan diawasi oleh inspektorat," terangnya.

Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jambi melalui Wakil Sekretaris II Kompol Kasdi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum ada menerima pengaduan terkait proses PPDB.

"Namun kami telah memberikan suatu pencerahan agar tidak terjadi suatu Pungli dalam kegiatan tersebut," bebernya.

Kasdi juga membeberkan bahwa Satgas Siber Pungli Provinsi Jambi juga telah memberikan pelayanan kepada

masyarakat, baik itu melalui WhatsApp, SMS, Gmail.

"Apabila terjadi Pungli dalam kegiatan ini (PPDB) silahkan laporan," jelasnya. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang (Kabid) SMA Disdik Provinsi Jambi Misrinadi, mengatakan pihaknya terus berupaya untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Berusaha meminimalisir, yang tidak baik ditahun lalu, menjadi baik di tahun ini, saya kira seperti itu," jelasnya.(afm)